e-ISSN: 2988-2311
p-ISSN: 2988-5434

DIVINITAS
JURNAL FILSAFAT DAN TEOLOGI KONTEKSTUAL
Volume 01 Nomor 02 Juli 2023: 255-264

INDONESIA SATU BUAT SEMUA, SEMUA BUAT SATU DALAM RELASI PEMIKIRAN NASIONALISME SOEKARNO DAN TAN MALAKA

Yakobus Nekin Nonobenany [a,1]

[a] *Universitas Sanata Dharma*

[1] *nekinyakobus@gmail.com*

ARTICLE INFO
Submitted : 11-07-2023
Accepted : 28-08-2023

Keywords:
Nasionalisme, Indonesia, Identity Independence, Soekarno, Tan Malaka

ABSTRACT

This paper discusses the thoughts of Sukarno and Tan Malaka in the context of Indonesian nationalism. They both had a strong spirit of nationalism in the struggle to free Indonesia from colonialism and achieve independence. Sukarno emphasized national unity, Indonesian leadership, and rejection of colonialism. Meanwhile, Tan Malaka saw social and economic injustice and championed nationalism as part of the class struggle. Despite their different ideological approaches, both Sukarno and Tan Malaka fought to achieve Indonesian independence by mobilizing the unity of the people and opposing colonialism. Their ideas helped shape Indonesia's national identity and consciousness. However, this paper also highlights the current Indonesian crisis, such as widespread corruption, social and economic inequality, a weak political system, identity conflicts, and religious fanaticism. Overcoming these crises requires political system reform and stronger law enforcement, increased social and economic equality, and dialogue between ethnic and religious groups. In this context, the nationalist ideas of Sukarno and Tan Malaka are still relevant. Indonesia should be an independent, just, equitable and sovereign country. Social justice for all Indonesians should be prioritized, and differences between regions and groups should be resolved to ensure equal justice. Excessive religious fanaticism should be overcome, and unity in diversity should be affirmed as the foundation of the Indonesian state. This

DOI: https://doi.org/10.24071/div.v1i2.6821
https://e-journal.usd.ac.id/index.php/Divinitas
E: divinitas@usd.ac.id

This work is licensed under a CC BY-SA
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

paper provides insights into the nationalist thoughts of Sukarno and Tan Malaka and the challenges of the Indonesian crisis faced by the country today.

ABSTRAK

Makalah ini membahas pemikiran Sukarno dan Tan Malaka dalam konteks nasionalisme Indonesia. Keduanya memiliki semangat nasionalisme yang kuat dalam perjuangan membebaskan Indonesia dari kolonialisme dan meraih kemerdekaan. Sukarno menekankan persatuan nasional, kepemimpinan Indonesia, dan penolakan terhadap kolonialisme. Di sisi lain, Tan Malaka melihat ketidakadilan sosial dan ekonomi, dan mengadvokasi nasionalisme sebagai bagian dari perjuangan kelas. Meskipun memiliki pendekatan ideologis yang berbeda, baik Sukarno maupun Tan Malaka berjuang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia dengan menggalang persatuan rakyat dan menentang kolonialisme. Ide-ide mereka membantu membentuk identitas dan kesadaran nasional Indonesia. Namun, makalah ini juga menyoroti krisis Indonesia saat ini, seperti korupsi yang meluas, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, sistem politik yang lemah, konflik identitas, dan fanatisme agama. Mengatasi krisis-krisis ini memerlukan reformasi sistem politik dan penegakan hukum yang lebih kuat, peningkatan kesetaraan sosial dan ekonomi, serta dialog antara kelompok etnis dan agama. Dalam konteks ini, ide-ide nasionalis Sukarno dan Tan Malaka masih relevan. Indonesia seharusnya menjadi negara yang merdeka, adil, setara, dan berdaulat. Keadilan sosial bagi semua warga Indonesia harus diprioritaskan, dan perbedaan antara wilayah dan kelompok harus diselesaikan untuk memastikan keadilan yang setara. Fanatisme agama yang berlebihan harus diatasi, dan persatuan dalam keberagaman harus diteguhkan sebagai landasan negara Indonesia.

PENDAHULUAN

Perempuan-perempuan berjalan beberapa jam lamanya, sampai di tempat yang dituju dan mengetahui bahwa mereka tidak bisa ikut mengetam padi, karena kebanyakan pekerja. Maka ada yang menangis tersedu-sedu dan putus asa sambil duduk di tepi jalan. Itulah sepenggal kisah rakyat Indonesia yang ditulis H.E.B. Schmalhausen, di dalam bukunya, Over Java en de Javanen.[1] Cerita ini kiranya dapat membantu orang zaman sekarang yang tidak mengalami penjajahan untuk masuk ke dalam perasaan rakyat Hindia Belanda kala itu. Kenyataan penderitaan

[1] Soekarno, Indonesia Menggugat, 1930, Bandung, 40-41.

ini menggerakkan banyak putra bangsa untuk berbuat sesuatu. Salah satunya ialah Soekarno, yang berjuang untuk membebaskan rakyat Indonesia dari penindasan dan imperialisme.

Tokoh selanjutnya yang mengalami perlakuan tidak adil adalah Tan Malaka. Yang mana ia melihat kemiskinan dan ketidakadilan yang melanda masyarakat Indonesia pada masa kolonial, ia mulai mencari pemahaman yang lebih komprehensif untuk mengatasi masalah tersebut. Ia tertarik pada pemikiran Marxisme, khususnya mengenai analisis materialisme yang menekankan peran ekonomi dalam perubahan sosial.

Dalam tulisan ini, penulis ingin menelaah pemikiran dari Soekarno dan Tan Malaka bagaimana mereka memiliki semangat nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. Yang mana para pendiri bangsa ini mencita-citakan Indonesia sebagai bangsa yang nasionalis bukan bangsa untuk satu/dua kelompok tertentu, melainkan Indonesia itu satu untuk semua.

NASIONALISME SUKARNO DAN TAN MALAKA BAGI BANGSA INDONESIA

Sukarno dan Tan Malaka merupakan dua tokoh yang sama-sama memiliki semangat nasionalisme untuk membela Indonesia terhadap penjajahan. Sukarno mencita-citakan Indonesia yang Nasionalis begitu juga dengan Tan. Semangat nasionalisme Sukarno dan Tan Malaka berpengaruh dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan membentuk identitas bangsa ini.

Nasionalisme Soekarno, yang dikenal sebagai nasionalisme Marhaenisme, sangat berpengaruh terhadap pandangan politiknya. Pemikiran nasionalisme Soekarno didasarkan pada prinsip-prinsip seperti nasionalisme anti-kolonial, persatuan nasional, dan kepemimpinan Indonesia dalam perjuangan melawan penjajah Belanda. Ia menekankan pentingnya persatuan rakyat Indonesia dari berbagai suku, agama, dan latar belakang sosial-ekonomi untuk mencapai kemerdekaan dan membangun negara yang merdeka. Sukarno juga menekankan pentingnya identitas Indonesia yang unik dan menolak segala bentuk kolonialisme dan imperialisme.[2]

Soekarno menganut pandangan nasionalisme yang radikal dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sebagai tujuan utama. Ia percaya pada kekuatan dan potensi bangsa Indonesia serta mengajak rakyat untuk membebaskan diri dari penjajahan. Soekarno menekankan pentingnya kedaulatan politik, ekonomi, dan budaya bangsa, serta kebanggaan akan identitas Indonesia. Terutama membebaskan bangsa Indonesia dari kolonialisme dan imperialisme. Sukarno mengatakan bahwa ada empat unsur dalam sistem imperialisme. Pertama, politik

[2] Ir. Soekarno, Mencapai Indonesia Merdeka, Panitia Penerbit di bawah Bendera Revolusi, 1964, 257-324.

memecah belah (*devide et impera*). Kedua, menetapkan Indonesia dalam kemunduran. Ketiga, membangun kepercayaan bahwa rakyat Indonesia yang kulitnya berwarna hitam adalah inferior dan bangsa kulit putih adalah superior. Keempat, membangun kepercayaan bahwa kepentingan imperialisme itu sama dengan kepentingan rakyat. Untuk mengatasinya diperlukan empat unsur perlawanan yaitu persatuan Indonesia, memerangi kemunduran akal budi rakyat lewat pendidikan dan sekolah rakyat, pemberantasan rasa rendah diri, dan menjalankan politik antitesis (tidak benar ajaran kaum imperialisme bahwa kedua pihak mempunyai persamaan kepentingan).[3]

Sementara itu, Tan Malaka dikenal sebagai tokoh revolusioner yang legendaris. Ia bersikukuh mengkritik pemerintah kolonial Hindia Belanda maupun pemerintahan republik di bawah Sukarno pasca-revolusi kemerdekaan Indonesia. Walaupun berpandangan sosialis, namun, ia juga sering terlibat konflik dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Sejarah hidup Tan memang tidak dapat dilepaskan dari komunisme – sebuah ideologi yang kini dianggap sebagai hantu yang menakutkan oleh banyak orang. Tapi, sebagaimana ditulis oleh sejarawan Harry A. Poeze, Tan Malaka adalah "seorang komunis dengan jenis yang lain". Artinya, walaupun ia protagonis ide-ide komunisme, banyak pemikirannya yang berseberangan dengan tokoh-tokoh komunis lainnya.

Karya besar Tan yang berjudul Madilog, mengajak dan memperkenalkan cara berpikir ilmiah kepada bangsa Indonesia. Madilog merupakan istilah baru dalam cara berpikir, dengan menghubungkan ilmu bukti serta mengembangkannya dengan jalan dan metode yang sesuai dengan akar kebudayaan Indonesia yang merupakan bagian dari kebudayaan dunia. Bukti adalah fakta, dan fakta adalah lantainya ilmu bukti. Bagi filsafat idealisme, yang pokok dan pertama adalah budi *(mind)*, kesatuan, pikiran dan pengindraan. Sementara, filsafat materialisme menganggap alam, benda dan realita nyata serta objek sekeliling sebagai yang ada, yang pokok dan yang pertama.[4] Tan merasa risau dengan cara berpikir bangsa Indonesia yang masih terkungkung oleh takhayul dan kepercayaan kepada hantu, kesaktian gaib, dan lain-lain.

Nasionalisme Tan Malaka ditandai dengan penolakan terhadap kolonialisme dan kapitalisme, serta menekankan perlunya perjuangan kelas untuk mencapai kemerdekaan dan kesetaraan sosial. Ia melihat nasionalisme sebagai bagian dari perjuangan yang lebih luas untuk membebaskan rakyat Indonesia dari penindasan.

---

[3] Soekarno, Indonesia Menggugat, 1930, Bandung, 114-127.

[4] Harry A. Poeze (2014), *Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia Jilid 4: September 1948 – Desember 1949*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor, hal. 161

Baik Sekarang maupun Tan sama-sama berjuang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia dengan menggalang persatuan rakyat Indonesia dan menentang penjajahan. Meskipun memiliki gaya politik yang berbeda, keduanya memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran nasional bangsa Indonesia. Nasionalisme Soekarno menekankan persatuan dan identitas nasional, sementara nasionalisme Tan menyoroti pertentangan kelas dan perjuangan sosial. Kedua pemikiran ini berkontribusi terhadap perjuangan melawan penjajahan dan membantu membentuk fondasi nasionalisme Indonesia yang ada hingga saat ini.

PERBEDAAN PEMIKIRAN SUKARNO DAN TAN MALAKA

Antara Sukarno dan Tan kendati keduanya merupakan tokoh nasionalis yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, pendekatan dan ideologi mereka memiliki perbedaan yang cukup mencolok. Berikut adalah beberapa perbedaan utama dalam pemikiran mereka:[5]

1. **Soal ideologi dan Pendekatan: Soekarno:** Soekarno adalah seorang nasionalis yang mengusung ideologi Marhaenisme, yang lebih berfokus pada persatuan nasional. Ia menekankan persatuan dan kepemimpinan Indonesia dalam perjuangan melawan penjajah. Pemikiran politiknya cenderung inklusif dan berusaha menyatukan berbagai kepentingan dalam negara. **Sedangkan Tan Malaka:** Tan adalah seorang revolusioner yang memperjuangkan nasionalisme dengan landasan ideologi Marxis. Ia menekankan pentingnya perjuangan kelas dan memandang nasionalisme sebagai bagian dari perjuangan yang lebih luas untuk membebaskan rakyat dari penindasan kapitalis. Pendekatannya lebih radikal dan menyoroti pertentangan kelas dalam perjuangan untuk kemerdekaan.

2. **Isu Ekonomi dan Sosial: Soekarno:** Soekarno memiliki visi ekonomi yang lebih nasionalis dan ingin mewujudkan keadilan sosial. Ia mendorong pengembangan ekonomi nasional yang mandiri dan berkeadilan, dengan menekankan kepemilikan dan kontrol penuh atas sumber daya nasional oleh negara. Soekarno juga memperjuangkan hak-hak sosial dan ekonomi bagi rakyat, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. **Sementara Tan Malaka:** Tan, sebagai seorang Marxis, menekankan perjuangan kelas dan kesetaraan sosial sebagai bagian dari perjuangan nasional. Ia melihat kapitalisme dan imperialisme sebagai sumber ketidakadilan sosial dan ekonomi, dan mengusulkan penghapusan sistem ekonomi yang

[5] Tim Edisi Khusus Soekarno, Sukarno Paradoks Revolusi Indonesia, PT. Gramedia, Jakarta, 2010, 18.

memperbudak. Pemikiran Tan lebih terfokus pada perubahan sosial untuk mencapai kesetaraan sistem sosial dalam masyarakat.

3. **Peran Agama: Sukarno:** Sukarno mengakui pentingnya peran agama dalam kehidupan dan persatuan nasional. Ia menekankan semangat penyatuan dalam masyarakat Indonesia yang beragam. Soekarno memperjuangkan prinsip Bhineka Tunggal Ika (Berbeda-beda tetapi tetap satu) sebagai dasar persatuan dalam keragaman. **Sedangkan, Tan Malaka:** Tan lebih bersifat sekularis dan lebih berfokus pada dimensi sosial dan ekonomi dalam perjuangannya. Meskipun ia mengakui peran agama dalam masyarakat, ia melihat agama sebagai faktor yang cenderung membagi dan menghalangi persatuan yang sejati.

Dalam hal posisi di hadapan penjajah Jepang, Tan mengambil sikap non-kompromistis, sedangkan Sukarno-Hatta bersedia bekerja sama dengan Dai Nippon. Dengan cara seperti itu Tan memang berbeda dengan para tokoh perjuangan kemerdekaan yang bersikap kompromistis terhadap penjajah, sementara Tan menempuh jalan revolusioner. Sangat terkenal ucapan Tan bahwa, "Tuan rumah tak akan berunding dengan maling yang menjarah rumahnya". Dengan kata lain, Tan menginginkan kemerdekaan penuh dari penjajah. Merdeka total atau tidak sama sekali. Tetapi, sebagaimana kita tahu, keinginan Tan ini ditolak oleh Soekarno.[6] Kendati ada perbedaan dalam pemikiran dan pendekatan mereka, baik Sukarno maupun Tan Malaka, namun kedua tokoh ini merupakan tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

KRISIS KEINDONESIAAN

Lebih dari 77 tahun Indonesia telah merdeka sebagai bangsa. Namun nyatanya, dalam perjalanan sejarah yang cukup Panjang itu, bangsa ini terus dirundung petaka yang memakan korban yang tidak sedikit. Mengapa sejarah kelam ini kembali terulang di bumi tercinta ini? Apakah takdir memang mengatakan demikian? Sejarah kembali terulang tanpa ada rasa penyesalan untuk kembali memikirkan format masa depan Indonesia lebih berdimensi manusiawi, keadilan, kesejahteraan. Yang ada saat ini adalah pertarungan antar elite politik tanpa memikirkan rakyat yang saat ini sedang sekarat. Mereka tidak lagi mempedulikan nasib rakyat yang saat ini susah memperoleh sembako murah.[7] Sungguh ironis "mereka" hanya memperebutkan posisi sedangkan bangsa ini sudah terkoyak-koyak.

---

[6] Adji Nugroho & Novi Fuji (2020), *Soekarno & Tan Malaka: Negarawan Sejati yang Pernah Diasingkan*, Yogyakarta: Roemah Soekarno, hal. 355

[7] Benny Susetyo, *ORDE PARA BANDIT*, Averroes Press, Yogyakarta, 31

Kekerasan demi kekerasan tidak kunjung usai. Salah satu masalah utama dalam krisis keindonesiaan adalah korupsi yang meluas di berbagai tingkat pemerintahan. Korupsi merugikan negara secara signifikan dengan membuang-buang sumber daya dan menghambat pembangunan yang berkelanjutan. Meskipun langkah-langkah telah diambil untuk mengatasi korupsi, seperti pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi upaya ini belum sepenuhnya berhasil mengatasi masalah tersebut.

Selain korupsi, masalah lain yang signifikan adalah ketimpangan sosial dan ekonomi. Meskipun ada kemajuan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, namun kesenjangan antara kaya dan miskin masih sangat besar. Pekerjaan yang layak dan kesempatan kerja yang memadai masih sulit ditemukan bagi banyak penduduk, terutama daerah pedesaan di Indonesia.

Krisis keindonesiaan juga tercermin dalam sistem politik yang lemah dan sering kali terkait dengan konflik politik. Ketergantungan pada politik patronase dan oligarki telah mempengaruhi integritas sistem politik dan membatasi partisipasi politik yang sehat dan inklusif. Masalah ini diperparah oleh kurangnya kemandirian lembaga-lembaga penegak hukum, yang sering kali rentan terhadap intervensi politik dan tekanan dari kekuatan eksternal.

Selain itu, tantangan lain dalam krisis keindonesiaan adalah konflik etnis, agama, dan kekerasan berbasis identitas. Indonesia memiliki keragaman budaya dan agama yang kaya, tetapi sering kali ketegangan dan konflik muncul antara kelompok-kelompok yang berbeda. Teroris dan gerakan separatis juga menjadi ancaman keamanan dalam negara.

Untuk mengatasi krisis keindonesiaan, langkah-langkah konkret perlu diambil. Pertama, reformasi sistem politik dan penegakan hukum yang lebih kuat harus diprioritaskan untuk memerangi korupsi dan memastikan keadilan dalam sistem politik. Kedua, kesenjangan sosial dan ekonomi harus diatasi melalui program-program yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan akses ke pendidikan dan kesehatan. Ketiga, penting untuk mempromosikan dialog antar kelompok etnis dan agama, dan membangun kerangka kerja yang memperkuat persatuan dan toleransi. Krisis keindonesiaan adalah tantangan serius yang perlu dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia secara bersama-sama.[8] Diperlukan komitmen untuk memperjuangkan semangat nasionalisme seperti yang dicita-citakan oleh kedua tokoh yang legendaris ini, (Bung Karno dan Tan Malaka).

[8] http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article. Keindonesiaan%20Digital diakses, 12 Juni 2023

RELEVANSI UNTUK (INDONESIA YANG SEHARUSNYA)

Gagasan Bung Karno yang terkenal" negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara "semua buat semua", "satu buat semua, semua buat satu". Saya yakin, bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah Permusyawaratan, perwakilan. Kebangsaan Indonesia yang bulat! Bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Selebes, Bali, atau lain-lain. Tetapi kebangsaan Indonesia, yang bersama-sama menjadi dasar satu *nationale staat.*[9] Lantas apa relevansi pidato Bung Karno yang saya kutip ini, dengan kejadian aktual yang terjadi di negara Indonesia? Sebagai anak bangsa saya menemukan tiga hal aktual yang sekarang sedang terjadi di Indonesia, saya mencoba menyandingkan antara pulau Jawa dan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

(a.) Keadilan dalam pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kini telah 77 tahun sudah Indonesia merdeka, tetapi masih jauh dari kata sejahtera. Saya mengambil kejadian aktual yang sedang terjadi seperti di pulau Jawa jalan tol di mana-mana sementara di NTT, satu jalan Tol pun tidak kita temukan. Jadi apakah keadilan pembangunan infrastruktur sudah dirasakan oleh semua rakyat Indonesia? Sekali lagi saya katakan belum sama sekali. (b.) Sumber daya manusia jika kita bandingkan antara provinsi-provinsi di Jawa pada umumnya dan provinsi-provinsi misalnya di Nusa Tenggara Timur, maka terlihat jelas bahwa sumber daya manusia yang ada di pulau Jawa pada umumnya jauh lebih maju dari pada sumber daya manusia yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai anak dari Provinsi NTT, saya mengalami sendiri ketika pada tahun 2019 saya datang ke pulau Jawa khususnya pertama kali ketika mengikuti program Postulat dari (Kongregasi Hati Kudus Yesus dan Hati Tersuci Maria) di Bandung, saya melihat bahwa potensi kemampuan intelektual seperti yang dimiliki oleh teman-teman yang berasal dari Jawa jauh lebih "unggul" dari kami yang berasal dari NTT. Inilah realitas kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh teman-teman yang berasal dari Jawa, dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh anak-anak NTT "jauh berbeda". Daerah-daerah ini harus membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah Republik Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia yang sesungguhnya bukan hanya di Pulau Jawa saja, tetapi di luar Jawa pun adalah bagian dari negara Indonesia. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mesti tertata dengan baik supaya jangan ada perbedaan-perbedaan yang

[9] Naskah Pidato Lahirnya Pancasila., hlm 17

merugikan satu sama lain, karena kita Bhinneka kita Indonesia. (c.) Fanatisme agama yang berlebihan, kita tahu bahwa bangsa Indonesia memang kaya akan aneka ragam bahasa, budaya, dan lebih penting bangsa Indonesia memiliki enam agama yang diakui oleh undang-undang. Semua agama itu bersatu dalam pangkuan ibu pertiwi. Tetapi realitas yang terjadi agama-agama tertentu sering kali mendapatkan perlakuan yang tidak adil atau tidak mendapatkan kedudukan yang sama seperti agama Islam. Misalnya gereja-gereja Kristen atau gereja Katolik seringkali dihanguskan dengan cara dibakar oleh saudara-saudara kita yang Muslim. Kekerasan demi-kekerasan tidak kunjung usai. Dan, masalahnya lagi, kekerasan di bangsa ini penuh dengan ornamen-ornamen religi yang semuanya itu berkedok agama. Inilah yang saya sebutkan sebagai fanatisme agama yang berlebihan tanpa mempedulikan agama lain yang semuanya itu diakui oleh undang-undang negara kesatuan republik Indonesia.

Lantas seperti apa Indonesia yang seharusnya bertolak dari pemikiran Sukarno dan Tan Malaka? Kedua tokoh ini menurut penulis sebenarnya Indonesia yang seharusnya adalah negara yang merdeka, berdaulat, adil, berkeadilan, persatuan dalam keragaman, dan memiliki kemandirian ekonomi. Pemikiran-pemikiran ini memberikan landasan untuk membangun negara yang berwawasan nasional, mengutamakan kepentingan rakyat, serta memperkuat identitas dan kesatuan bangsa Indonesia. Artinya, keputusan dan kebijakan negara harus diambil dengan mempertimbangkan kepentingan nasional, kesatuan, dan identitas bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, penting untuk memperkuat institusi-institusi demokrasi, pemerintahan yang bersih dan transparan, serta memastikan partisipasi aktif rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Negara yang Adil dan Berkeadilan: Indonesia seharusnya menjadi negara yang adil dan berkeadilan, yang mengutamakan kepentingan rakyatnya. Hal ini mencakup pemerataan kesempatan dan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Negara harus berperan aktif dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta memastikan bahwa kekayaan alam dan sumber daya nasional digunakan untuk kesejahteraan bersama.

Keseluruhan, pemikiran-pemikiran Sukarno dan Tan Malaka memberikan pandangan tentang bagaimana Indonesia seharusnya menjadi negara yang merdeka, berdaulat, adil, berkeadilan, persatuan dalam keragaman, dan memiliki kemandirian ekonomi. Pemikiran-pemikiran ini membawa visi pembangunan negara yang berorientasi pada kepentingan rakyat, menjaga identitas nasional, serta memperkuat kesatuan agar Indonesia benar-benar satu buat semua, semua buat satu bukan negara untuk golongan tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Soekarno. Mencapai Indonesia Merdeka: Panitia Penerbit di Bawah Bendera Revolusi. 1964.

Soekarno. Naskah Pidato Lahirnya Pancasila.

Sukarno. Indonesia Menggugat: Pidato Pembelaan Bung Karno di depan Pengadilan Kolonial Bandung, 1930. Haji Masagung, 1989.

Poeze, Harry A. Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia jilid 4: September 1948 – Desember 1949. Jakarta: Pustaka Obor, 2014.

Poeze, Harry A. Pergulatan Menuju Republik Tan Malaka 1925-1945. Grafiti Press, 1999.

Nugroho, Adji, dan Novi Fuji. Soekarno & Tan Malaka: Negarawan Sejati yang Pernah Diasingkan. Yogyakarta: Roemah Soekarno, 2020.

Susetyo, Benny. ORDE PARA BANDIT. Yogyakarta: Averroes Press, 2001.

Sumber Internet

http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article. Keindonesiaan%20Digital diakses, 12 Juni 2023; 20:12 WIB

https://mip.umy.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/NASIONALISME-DAN-IDENTITAS-KEWARGANEGARAAN-STUDI-TENTANG-PANDANGAN-KEINDONESIAAN-MAHASISWA-ACEH-APPPTM.pdf, diakes 12 Juni 2023; 21:19 WIB